SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 91), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 77), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 91 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Sekretaris Daerah
Kelas 15

Staf Ahli Bupati
Kelas 13

Kelas Jabatan	B	K	S
Kelas 15	1	1	0
Kelas 14	3	3	0
Kelas 13	3	3	0
Kelas 12	10	23	-13
Kelas 11	0	9	-9
Kelas 10	20	34	-14
Kelas 9	6	12	-6
Kelas 8	8	40	-32
Kelas 7	49	78	-29
Kelas 6	21	50	-29
Kelas 5	22	34	-12
Kelas 3	0	10	-10
Kelas 1	7	82	-75
Jumlah	150	379	-229

Kelompok Jabatan Fungsional

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Madya	12	0	6	-6
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	12	0	1	-1
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12	1	3	-2
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	12	0	3	-3
Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
Pranata Komputer Ahli Madya	11	0	4	-4
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11	0	2	-2
Analis Hukum Ahli Madya	11	0	1	-1
Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	0	2	-2

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Kelas 14

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Kelas 14

Asisten AdministrasiUmum
Kelas 14

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Perencana Ahli Muda	10	1	2	-1
Perencana Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Penata Kelola Pemerintahan	7	3	4	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	1	0
Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	5	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	3	0

Kepala Bagian Hukum
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	10	0	5	-5
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	8	0	6	-6
Analis Hukum Ahli Muda	9	1	1	0
Analis Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	0	2	-2
Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	0	2	-2
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	4	7	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Bagian Perekonomian
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	4	-1
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	3	3	0
Pengolah Data dan Informasi	6	0	1	-1

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	3	3	0
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	2	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	4	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	1	1	0
Pengadministrasi Perkantoran	5	0	1	-1

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	2	2	0
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Muda	10	8	13	-5
Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Ahli Pertama	8	3	13	-10
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	7	1	4	-3
Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	2	0
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	7	2	2	0
Pengelola Layanan Pengadaan	6	1	4	-3
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2

Kepala Bagian Umum
Kelas 12

Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
Kelas 9

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Arsiparis Ahli Pertama	8	0	1	-1
Arsiparis Penyelia	8	0	1	-1
Arsiparis Mahir	7	1	1	0
Arsiparis Terampil	6	0	1	-1
Pranata Komputer Penyelia	8	0	1	-1
Pranata Komputer Mahir	7	0	1	-1
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	7	1	1	0
Pengolah Data dan Informasi	6	1	2	-1
Pengadministrasi Perkantoran	5	3	5	-2

Kepala Subbagian Keuangan
Kelas 9

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	5	6	-1
Pengolah Data dan Informasi	6	0	2	-2

Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
Kelas 9

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	-1
Pengelola Layanan Operasional	6	2	4	-2
Pengadministrasi Perkantoran	5	8	8	0
Operator Layanan Operasional	5	5	10	-5
Operator Layanan Operasional	3	0	10	-10
Operator Layanan Operasional	1	7	82	-75

Kepala Bagian Organisasi
Kelas 12

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Analis Kebijakan Ahli Muda	10	0	1	-1
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10	2	2	0
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	0	2	-2
Pranata Komputer Terampil	6	0	1	-1
Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	10	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	3	3	0

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Kelas 12

Kepala Subbagian Protokol
Kelas 9

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Komputer Ahli Pertama	8	3	4	-1
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8	1	3	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	0	2	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	1	3	-2
Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	0	2	-2
Penelaah Teknis Kebijakan	7	3	8	-5
Penata Keprotokolan	7	3	4	-1
Pengelola Keprotokolan	6	5	9	-4
Pengolah Data dan Informasi	6	5	12	-7
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	5	-4

Kelompok Jabatan Fungsional

NAMA JABATAN	KL	B	K	S
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9	1	2	-1
Pranata Komputer Ahli Muda	9	0	3	-3

Keterangan :
KL : Kelas Jabatan
B : Jumlah Pegawai yang tersedia
K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja
S : Selisih

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ